BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi, Cianjur merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya Penanggulangan Bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;

b. bahwa upaya Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cianjur, maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cianjur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada tingkat nasional.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah lembaga Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada tingkat Provinsi.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya Disingkat BPBD Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut Badan.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur .

11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
14. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
16. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera dan pascabencana.
17. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
20. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
21. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan pascabencana.
25. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
27. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pascabencana.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disetujui oleh DPRD.

BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

(2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :
   a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
   b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
   c. pengurangan risiko Bencana dan pemanduan pengurangan risiko Bencana melalui program pembangunan;
   d. pengalokasian APBD untuk program pengurangan risiko Bencana yang memadai;

(3) Dalam melaksanakan tanggung jawab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.

(4) BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat melibatkan unsur lain diantaranya:
   a. instansi pemerintah yang terkait;
   b. masyarakat;
   c. organisasi kemasyarakatan;
   d. lembaga usaha;
   e. mediamassa;

f. organisasi pemuda dan olah raga;
g. organisasi kemahasiswaan;
h. lembaga pendidikan;
i. lembaga kesehatan;
j. organisasi keagamaan; dan/atau
k. lembaga internasional.

Pasal 3

(1) Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
a. penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
c. pelaksanaan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana;
e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan Bencana yang berbentuk uang atau barang;

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

(2) BPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. Badan
b. unsur pengarah; dan
c. unsur pelaksana.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

(1) Badan mempunyai tugas pokok:
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
h. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
a. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 6

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dan/atau kepala pelaksana dalam Penanggulangan Bencana.

(2) Unsur Pengarah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana;
b. pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
c. evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 7

(1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terpadu meliputi prabencana, saat tanggap darurat, Pemulihan segera dan pascabencana.

(2) Unsur Pelaksana dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
b. pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
c. pelaksanaan secara terkoordinasi dan terpadu dengan perangkat daerah, instansi terkait yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi :
a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
d. lingkup luas wilayah.

(2) Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

(3) Jenis Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, meliputi
a. Bencana Alam;
b. Bencana Nonalam; dan
c. Bencana Sosial.

(4) Ketentuan mengenai jenis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 2

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
a. perencanaan Penanggulangan Bencana;
b. pengurangan Risiko Bencana;
c. pencegahan;
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e. persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana;
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
g. pendidikan dan pelatihan; dan
h. persyaratan analisis Risiko Bencana;

(2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 12

Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dengan program kegiatan dan rincian anggaranya.

Pasal 13

(1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
   b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
   c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
   d. pemilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
   e. penentuan mekanisme kesiapan dan Penanggulangan dampak Bencana; dan
   f. pembagian tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

(3) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

(4) Rencana Penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.

(5) Ketentuan mengenai rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.

(2) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
   a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
   b. perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
   c. pengembangan budaya sadar Bencana;
   d. pembinaan komitmen terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
   e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan Penanggulangan Bencana.

(3) Dalam upaya pengurangan Risiko Bencana, Badan menyusun rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten terkait, dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan Risiko Bencana .

(4) rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan oleh Kepala Badan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
   a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
   b. pemantauan terhadap :
      1. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam;
      2. penggunaan teknologi tinggi;
   c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
   d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab, Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat.

Pasal 16

Pemaduan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 17

(1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.

(2) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana, yang disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.

(3) Badan sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi.

(2) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat peta rawan Bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan Bencana.

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 19

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 20

(1) Persyaratan standar teknis Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam Penanggulangan Bencana.

(2) Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 3

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 21

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :

a. kesiapsiagaan;
b. peringatan dini; dan
c. mitigasi bencana.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.

(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
   a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
   b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
   c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
   d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
   e. penyiapan lokasi evakuasi;
   f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
   g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

(3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten serta dilaksanakan bersama masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam Penanggulangan Bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya Bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. peralatan peringatan dini sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
b. posko Bencana beserta peralatan pendukung;
c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi Daerah;
d. peta rawan Bencana;
e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
f. prosedur tetap Penanggulangan Bencana;
g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
i. tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan *velbed* serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
j. sarana air bersih dan sarana sanitasi di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi untuk laki-laki dan perempuan;
k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana; dan
l. lokasi sementara pengungsi.

(3) Sarana dan prasarana khusus meliputi :
a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian Bencana kepada instansi yangmemerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat;
c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
d. trauma center oleh Pemerintah Daerah Kabupaten ataupun lembaga masyarakat peduli Bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban Bencana;
e. alat transportasi dalam Penanggulangan Bencana;
f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
g. sarana dan prasarana khusus lainnya.

(4) Badan bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bencana di Daerah.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana Penanggulangan kedaruratan Bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secaraterkoordinasi oleh Badan.

(2) Rencana Penanggulangan kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 25

(1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi Bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada setiap instansi/lembaga dalam jejaring kerja Badan.

(3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah :
a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas dan wewenang di Daerah;
b. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah Bencana;
c. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah Bencana;
d. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Bupati, BPBD Provinsi dan kepala BNPB;
e. membantu dan memandu operasi di wilayah Bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
f. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana secara konsisten.

Pasal 26

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. pengamatan gejala bencana;
b. penganalisaan data hasil pengamatan;
c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
e. pengambilan tindakanoleh masyarakat.

(3) Pengamatan gejala Bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.

(4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada Badan sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

(5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya.

(6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sesuai mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.

(7) Badan mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 27

(1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan Bencana.

(2) Kegiatan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui:
a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis risiko Bencana;

b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

(3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi :
a. luas wilaya Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
b. jumlah penduduk Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
d. jenis Bencana yang sering terjadi atau berulang;
e. daerah rawan Bencana dan Risiko Bencana;
f. cakupan luas wilayah rawan Bencana;
g. lokasi pengungsian;
h. jalur evakuasi;
i. sumber daya manusia Penanggulangan Bencana; dan
j. hal lainnya sesuai kebutuhan.

(4) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berfungsi untuk :
a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindakPenanggulangan Bencana;
b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan Bencana;
d. pengembangan sistem peringatan dini;
e. mengetahui bahaya Bencana, Risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana; dan
f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan Bencana.

Pasal 28

Dalam rangka mitigasi bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya :
a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan :
   1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau Risiko Bencana;
   2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
   3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman Bencana.

b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi, tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan, menetapkan :
   1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
   2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.

c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan, menetapkan :
   1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
   2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
   3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan
   4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng.

d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah, ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.

Pasal 29

Dalam rangka mitigasi Bencana untuk kawasan rawan gelombang pasang, Pemerintah Daerah Kabupaten dan sesuai kewenangannya, menetapkan :
a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman Bencana; dan
b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman Bencana dan kepentingan umum.

Pasal 30

Dalam rangka mitigasi Bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya, menetapkan :
a. penetapan batas dataran banjir;
b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
d. pengendalian kegiatan permukiman.

Pasal 31

Pencegahan Bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui :
a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yangditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau Bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;
b. kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan Bencana dilakukan melalui :
   1. pengaturan, meliputi :
      a) penetapan kawasan rawan Bencana pada setiap wilayah sungai;
      b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
      c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
      d) penetapan proseduroperasi standar evakuasi korban bencana akibatdaya rusak air.
   2. pembinaan, meliputi :
      a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
      b) pelatihan tanggap darurat.
   3. pengawasan, meliputi :
      a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan Bencana sesuai dengan tingkat kerawanan Daerah yangbersangkutan; dan
      b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
   4. pengendalian, meliputi :
      a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan Bencana sesuai dengan tingkat kerawanan Daerah yang bersangkutan; dan
      b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan Bencana.
c. penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataanruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan kawasan rawan Bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan:
a. banjir;
b. kekeringan;
c. erosi dan sedimentasi;
d. longsor;
e. amblas;
f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
h. wabah penyakit.

(2) Kawasan rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan Bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.

(3) Kawasan rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.

(4) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan Bencana di Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan sistem peringatan dini dan desiminasi informasi.

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh intansi yang mengelola sumber daya air atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 34

(1) Dalam hal tingkat kerawanan Bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan kawasan rawan Bencana tertutup bagi permukiman.

(2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangananya.

Pasal 35

(1) Dalam rangka mitigasi Bencana untuk kawasan rawan Bencana gunung api, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya :
a. untuk kawasan yang berisiko rendah, melakukan :
   1. pengendalian ijin kegiatan permukiman perkotaan dan perdesaan;
   2. pembatasan kegiatan industridengan konstruksi bangunan tahan gempa;
   3. pembatasan kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan kepadatan rendah-tinggi; dan
   4. pengendalian pemanfaatanruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan beririgasi serta pertanian tadah hujan, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur dan sosiokultur, serta pertambangan rakyat.

b. untuk kawasan yang berisiko sedang, menetapkan :
   1. pengendalian kegiatan permukiman dengan konstruksi beton bertulang, kepadatan bangunan sedang-rendah, dan pola permukiman menyebar;

2. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan kering, perikanan, perkebunan, pariwisata biotis dan abiotis, dan pertambangan rakyat; dan
3. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan hutan produksi dan kawasan pemanfaatan hutan.

c. untuk kawasan yang berisiko tinggi, menetapkan :
   1. penetapan kawasan sebagaikawasan lindung;
   2. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kehutanan dan pariwisata geofisik.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kawasan rawan Bencana gunung api, menetapkan dan menandai jalur aliran lahar serta jalur evakuasi yang harus diketahui penduduk yang terkena dampak bencana gunung api.

Pasal 36

Dalam rangka mitigasi Bencana untuk kawasan rawan bencana geologi Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannnya, melakukan:
a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 37

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan Bencana gempa bumi dengan tingkat kerentanan rendah, sedang, dan tinggi, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya, menetapkan zonasi dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggap Darurat

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur potensi kekuatan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia di Daerah.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban Bencana tanpa perlakuan diskriminasi.

(3) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi :
   a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
   b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
   c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yangterkena Bencana;
   d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban Bencana sesuai standar pelayanan minimal;
   e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan

f. pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

(4) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikendalikan oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Pengkajian secara Cepat dan Tepat

Pasal 39

Pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yangtepat dalam Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap :

a. cakupan lokasi Bencana;
b. jumlah korban Bencana;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 40

(1) Dalam hal terjadi Bencana tingkat Daerah, Bupati menetapkan pernyataan Bencana dan penentuan status keadaan darurat Bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pernyataan Bencana dan penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya Bencana.

(3) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan akses bagi Badan dalam melaksanakan :

a. pengerahan sumber daya manusia;
b. pengerahan peralatan;
c. pengerahan logistik;
d. imigrasi, cukai, dan karantina;
e. perizinan;
f. pengadaan barang/jasa;
g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
h. penyelamatan; dan
i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Paragraf 4

Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 41

(1) Kepala Badan berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerahdan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat Bencana.

(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yangrusak akibat Bencana.

(3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada daerah lain, Provinsi dan/atau Pemerintah.

(4) Pemerintah Daerah Kabupaten yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari kabupaten/kota lain yang mengirimkan bantuannya.

(5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan di bawah kendali Kepala Badan.

Pasal 42

Sistem manajemen logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan;
b. sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreativitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara;
c. distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara penyampaian yang khusus, untuk mengatasi keterbatasan transportasi, persebaran kejadian, dan keterisolasian ketika terjadi Bencana;
d. inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggungjawaban logistik dan peralatan kepada masyarakat yang terkena Bencana;
e. memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban Bencana;
f. koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi;
g. mengantisipasi kemungkinan adanya bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri; dan
h. memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

Paragraf 5

Pengadaan barang dan/atau Jasa serta Konstruksi Darurat

Pasal 43

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah Bencana.

(2) Pada saat keadaan darurat Bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
   a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
   b. pertolongan darurat;
   c. evakuasi korban Bencana;
   d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
   e. pangan;
   f. sandang;
   g. pelayanan kesehatan;
   h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
   i. perbaikan jalan, jembatan dan prasarana irigasi.

(4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah, setelah memperoleh persetujuan Kepala Badan sesuai kewenangannya.

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 6

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Uang dan/atau Barang

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan dana siap pakai secara khusus untuk pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dalam penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), yang bersumber dari APBD dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat Bencana.

(3) Penyediaan dana siap pakai secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh dari APBN yang diterima langsung oleh Badan dan dipertanggungjawabkan kepada BNPB, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima, yang dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

(4) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana.

(5) Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan kemudahan dan perlakuan khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Tanda bukti transaksi yang tidak mungkin diperoleh dalam pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat saat tanggap darurat, diberikan perlakuan khusus.

(7) Ketentuan mengenai sumber pembiayaan dan mekanisme penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Bupati.

(8) Kepala Badan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6), untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 45

(1) Badan dapat menerima dan mengelola uang dan/atau barang dari masyarakat untuk penanganan darurat Bencana.

(2) Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan kemudahan dan perlakuan khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan uang dan/atau barang Badan.

(4) Kepala Badan sesuai kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat kepada Bupati dan tidak terpisahkan dari laporan akuntabilitas kinerja Badan.

Paragraf 7

Penyelamatan

Pasal 46

(1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban Bencana.

(2) Untuk memudahkan penyelamatan korban Bencana dan harta benda, Badan mempunyai kewenangan :
   a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan jiwa;
   b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
   c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
   d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
   e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

(3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal :
   a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
   b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.

(4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban Bencana.

Paragraf 8

Komando

Pasal 47

(1) Dalam status keadaan darurat, Badan sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

(2) Kepala Pelaksana Badan dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana dalam melaksanakan fungsi komando.

(3) Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.

(4) Ketentuan mengenai komandan penanganan darurat Bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Pada status keadaan darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando Tanggap Darurat Bencana.

(6) Pos komando sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.

(7) Pos komando sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dikoordinasikan dengan Badan dan berpedoman pada BNPB.

Pasal 48

(1) Dalam status keadaan darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana di lokasi Bencana.

(2) Pos komando lapangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana sesuai cakupan bencananya.

(3) Tugas penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dikoordinasikan dengan Badan dan berpedoman pada BNPB.

Pasal 49

(1) Dalam melaksanakan penanganan Tanggap Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi Tanggap Darurat Bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana Tanggap Darurat Bencana.

(2) Komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian Bencana.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai fungsi :
   a. perencanaan operasi teknis penanganan Tanggap Darurat Bencana;
   b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
   c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumberdaya untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana secara tepat, efisien dan efektif;
   d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat tingkat Daerah; dan
   e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian Bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Paragraf 9

Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 50

(1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana dilaksanakan melalui upaya kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban Bencana.

(2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

(3) Dalam hal terjadi ekskalasi Bencana, Badan dapat meminta dukungan kepada BPBD Provinsi dan BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana.

(4) Dalam pertolongan darurat Bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.

(5) Terhadap masyarakat terkena Bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Paragraf 10

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 51

(1) Dalam keadaan Tanggap Darurat Bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal, yang meliputi:
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. pangan;
f. sandang;
g. pelayanan kesehatan;
h. pelayanan psikososial; dan
i. penampungan serta tempat hunian.

(2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah.

(3) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan oleh lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 52

(1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan, dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 12

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 53

Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi Bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh Badan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pascabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana, meliputi :
a. Rehabilitasi; dan
b. Rekonstruksi.

Paragraf 2

Rehabilitasi

Pasal 55

(1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascabencana, Pemerintah, Daerah Kabupaten bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan Rehabilitasi, meliputi:
   a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
   b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
   c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
   d. pemulihan sosial psikologis;
   e. pelayanan kesehatan;
   f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
   g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
   h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
   i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
   j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Prioritas kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana, serta aspirasi masyarakat.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dengan memperhatikan:
   a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
   b. kondisi sosial;
   c. adat istiadat;
   d. budaya lokal; dan
   e. ekonomi.

(4) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 56

Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan Rehabilitasi sebagai berikut:
j. menempatkan masyarakat sebagai korban Bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan Rehabilitasi;
b. kegiatan Rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan segera serta kegiatan rekonstruksi;
c. pemulihan segera dilakukan oleh tim penilai cepat segera setelah terjadi Bencana; dan
d. program Rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan tingkatan Bencana, dengan ketentuan tujuan utama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah tercapai.

Pasal 57

Strategi penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi dilakukan melalui:
a. melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan Rehabilitasi;
b. memperhatikan karakter Bencana, Daerah dan budaya masyarakat; dan
c. memperhatikan tingkat kerugian, kerusakan dan kendala Daerah berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan.

Pasal 58

Sasaran kegiatan Rehabilitasi dilakukan melalui:
a. kelompok manusia dan seluruh kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh Bencana;
b. sumberdaya buatan yang mengalami kerusakan akibat Bencana sehingga berkurang nilai gunanya; dan
c. ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.

Pasal 59

(1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan :
   a. kawasan permukiman;
   b. kawasan industri;
   c. kawasan usaha; dan
   d. kawasan bangunan gedung.

(2) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada perencanaan teknis, yang paling sedikit memuat :
   a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi Bencana;
   b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan kerugian;
   c. potensi sumberdaya yang ada di daerah Bencana;
   d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
   e. rencana program dan kegiatan;
   f. gambar desain;
   g. rencana anggaran;
   h. jadwal kegiatan; dan
   i. pedoman Rehabilitasi.

(3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai bidang tugas masing-masing, bersama-sama dengan masyarakat.

Pasal 60

(1) Perbaikan sarana dan prasarana umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

(2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. keselamatan;
   b. sistem sanitasi;

c. penggunaan bahan bangunan; dan
d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

(3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 61

(1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat Bencana agar dapat dihuni kembali, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan sebagai stimulan berupa bahan material, komponen rumah atau uang, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah, yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter Daerah dan budaya masyarakat.

(2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti standar teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis, meliputi :
a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
b. pendampingan pemulihan trauma;
c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis;

(2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, secara terkoordinasi dengan Badan.

Pasal 63

(1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak Bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Badan, meliputi upaya :
a. membantu perawatan korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
b. membantu perawatan korban Bencana yang meninggal;
c. menyediakan obat-obatan;
d. menyediakan peralatan kesehatan;
e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
f. merujuk ke rumah sakit terdekat.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.

(2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

(3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

(1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.

(2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
a. layanan advokasi dan konseling;
b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
c. pelatihan.

(3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 66

(1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.

(2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

(3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 67

(1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah Bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;

b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 68

(1) Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah Bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik melalui upaya:
a. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 69

(1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan Bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

(2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BNPB atau Badan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak Bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan Badan.

Paragraf 3

Rekonstruksi

Pasal 71

(1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan Rekonstruksi, terdiri dari :
   a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
   b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
   c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
   d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
   e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
   f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
   g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
   h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(3) Prioritas kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

Pasal 72

Kebijakan yang mendasari penyelenggaraan Rekonstruksi adalah sebagai berikut :

a. Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat;
b. Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban untuk menyiapkan program dan alokasi anggaran untuk rekonstruksi pascabencana;
c. Pemerintah memberikan fasilitasi dan pendampingan bantuan dana yang dimanfaatkan berdasarkan kearifan lokal;
d. bantuan luar negeri, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kerja sama bilateral dan multilateral maupun non Pemerintah Daerah Kabupaten diperkenankan, sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. peningkatan kehidupan masyarakat melalui pembangunan kembali prasarana, sarana dan sistem pelayanan masyarakat;
f. pemaduan seluruh proses Rekonstruksi melalui upaya-pengurangan risiko Bencana yang terdiri dari usaha pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat Bencana, sehingga Risiko Bencana dimasa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin;
g. pelaksanaan Rekonstruksi yang dapat mendorong dikembangkannya atau direvisinya peraturan dan standar keselamatan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik tingkat nasional maupun lokal dan mengadaptasi pengetahuan terbaru mengenai bahaya dan kerentanan setelah terjadi Bencana;
h. penempatan isu ekosistem/lingkungan hidup dan sosial budaya secara proporsional dalam perencanaan Rekonstruksi;
i. pelaksanaan Rekonstruksi dengan proses yang akuntabel dan auditable serta memenuhi asas transparansi publik; dan
j. penyelenggaraan Rekonstruksi dilakukan di bawah koordinasi BNPB dan/atau Badan.

Pasal 73

Strategi dalam penyelenggaraan Rekonstruksi adalah :

a. melibatkan partisipasi masyarakat, baik masyarakat yang terkena Bencana maupun masyarakat secara umum, melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan Rekonstruksi dengan menciptakan situasi kondusif bagi peranserta masyarakat melalui mekanisme pelibatan yang sederhana;
b. memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan dalam kondisi aktual di lapangan, melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat;
c. mendorong pengembangan kapasitas pelaksanaan Rekonstruksi pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun penegakan aturan yang ada, dalam rangka menjamin hasil Rekonstruksi yang memiliki ketahanan yang baik terhadap Bencana di masa yang akan datang;
d. mengutamakan solusi jangka panjang daripada penyelesaian masalah yang bersifat sementara;
e. memberikan perhatian khusus terhadap usaha berkelanjutan yang bersifat lokal;
f. menggunakan proses perencanaan yang terpadu berdasarkan penetapan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang;
g. mengutamakan usaha pemulihan kondisi ekonomi lokal secara cepat sebagai bagian dari kegiatan prioritas jangka pendek dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal dalam proses Rekonstruksi;
h. memadukan teknologi maju sesuai dengan sumber daya lokal; dan
i. menyediakan akses informasi seluruh kegiatan Rekonstruksi untuk seluruh pemangku kepentingan dalam rangka membangun komunikasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses Rekonstruksi.

Pasal 74

Sasaran penyelenggaraan Rekonstruksi adalah :

a. berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pascabencana; dan
b. tercapainya kehidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dari sebelum terjadinya bencana sehingga mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi baru pascabencana.

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dengan memperhatikan:
    a. rencana tata ruang;
    b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
    c. kondisi sosial;
    d. adat istiadat;
    e. budaya lokal; dan
    f. ekonomi.

(2) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah Kabupaten.

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat :
a. rencana struktur ruang wilayah;
b. rencana pola ruang wilayah;
c. penetapan kawasan;
d. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
f. konsolidasi pertanahan.

(3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, dan aspirasi masyarakat daerah Bencana yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 77

(1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi :
a. standar teknik konstruksi bangunan;
b. penetapan kawasan; dan
c. arahan pemanfaatan ruang.

(2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatan Bencana.

Pasal 78

(1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan :
a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap Bencana;
b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar Bencana dan peduli bencana;
c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan
d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.

(2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB dan Badan.

Pasal 79

(1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana, melalui upaya :
a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
b. menyesuaikan dengan tata ruang;
c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
d. memperhatikan kearifan lokal; dan
e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencanapada daerah yang bersangkutan.

(2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangannya.

Pasal 80

(1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan Bencana, dengan cara :
a. melakukan kampanye peduli Bencana;
b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.

(2) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB dan Badan.

Pasal 81

(1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya :
a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;
b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.

(2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB dan Badan.

Pasal 82

(1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah Bencana ke arah lebih baik, melalui upaya :
a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

(2) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

(2) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB dan BNPB dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 84

(1) Badan mengkoordinasikan dan memadukan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah yang dilakukan oleh Perangakat Daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, swasta, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan berkoordinasi dengan BNPB.

(3) Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dan aparatur, Bupati menetapkan standar operasional prosedur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Sumber.Pendanaan

Pasal 85

(1) Dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersumber dari:
a. APBD;
b. masyarakat; dan
c. sumber lainnya yangsah dan tidak mengikat.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana dalam tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera, dan pascabencana.

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan dana siap pakai dalam anggaran Penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran Badan dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.

Pasal 86

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara :
   a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana Penanggulangan Bencana;
   b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana Penanggulangan Bencana; dan
   c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

(2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

(3) Setiap pengumpulan bantuan Penanggulangan Bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau instansi/lembaga terkait.

(4) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan Penanggulangan Bencana.

(5) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pengumpulan bantuan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana APBD

Paragraf 1

Penyusunan Program/Kegiatan

Pasal 87

(1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan pengelolaan keuangan Daerah.

(2) Program/kegiatan dan pendanaan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara reguler tahunan dalam APBD/Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari APBN melalui daftar isian pelaksanaan anggaranyangbersifat anggaran dekonsentrasi, tugas pembantuan dan atau pendanaan lain sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Penentuan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dan pascabencana dengan pendanaan dari sumber APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), disesuaikan dengan kewenangan urusan Pemerintah Daerah;

(2) Dalam hal bobot kewenangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pemerintah Daerah, pendanaan program/kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dan pascabencana wajib disediakan dari APBD Kabupaten yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal pendanaan dari sumber APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memadai/terbatas kemampuannya, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengajukan bantuan melalui anggaran belanja bantuan keuangan kepada Provinsi dan Pemerintah, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggunaan Dana

Pasal 89

(1) Dana Penanggulangan bencana di Daerah digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pascabencana.

(2) Penggunaan dana Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumber daya.

(3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dipergunakan dalam program/kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

(4) Dalam hal APBD tidak memadai, Bupati dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

(5) Pendanaan kegiatan tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pascabencana wajib menggunakan dana APBD yang merupakan program/kegiatan reguler tahunan APBD atau Perubahan APBD yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintag Daerah.

Pasal 90

(1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban Bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan tenaga relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala Badan.

(2) Pengerahan sumber daya manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang patut dan wajar sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai untuk Tanggap Darurat Bencana pada APBD dan/atau dari sumber dana lainnya yang memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 91

(1) Pelaksanaan kegiatan Tanggap Darurat Bencana pada aspek fisik sarana prasarana bersifat Penanggulangan darurat/sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk:
   a. kegiatan Penanggulangan darurat Bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur sumberdaya air yang rusak berat/longsor/hancur akibat Bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsoran, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah, dan/atau jenis Penanggulangan darurat lainnya;
   b. kegiatan Penanggulangan darurat Bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat/hancur akibat Bencana dilakukan dengan pembentukan badan jalan atau jenis Penanggulangan darurat lainnya;
   c. kegiatan Penanggulangandarurat Bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan yang rusak berat/hancur/ambruk, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda, atau jenis Penanggulangan darurat lainnya;
   d. kegiatan Penanggulangandarurat Bencana pada fisik prasarana/sarana bidang kesehatan yang rusak berat/hancur akibat Bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis Penanggulangan darurat lainnya; dan
   e. kegiatan Penanggulangan darurat Bencana pada instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah Daerah Kabupaten yang belum diserahterimakan menjadi aset milik Pemerintah Daerah/desa yang rusak berat/hancur akibat Bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara.

(2) Pendanaan kegiatan Penanggulangan darurat Bencana pada fisik prasarana/sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b,dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai pada APBD Perangkat Daerah dan atau Badan, kecuali apabila anggarannya tidak mencukupi dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan kegiatan Penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan, kesehatan dan instalasi air bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau diusulkan untuk memperoleh pendanaan dari anggaran Perubahan APBD atau dari APBD tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 3

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 92

(1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, dilakukan oleh PPKD dan Perangkat Daerah sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara reguler tahunan.

(2) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti prosedur dan sistem keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan saat darurat Bencana dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan.

(4) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pertanggungjawaban aspek administrasi dan aspek materil.

(5) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan pertanggungjawaban atas bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan.

(6) Pertanggungjawaban aspek materil sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) merupakan pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggungjawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi prasarana/sarana maupun kegiatan non fisik.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 93

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan Bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, pemulihan segera dan pascabencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan Penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

(5) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan pendistribusiannya.

Pasal 94

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena Bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban Bencana, terdiri dari:
a. santunan duka cita;
b. santunan kecacatan;
c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;

(3) Mekanisme pemberian bantuan Bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
a. pendataan;
b. identifikasi;
c. verifikasi; dan
d. penyaluran.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 95

(1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan instansi/lembaga Pemerintah, badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGAINTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 96

(1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya Bencana.

(3) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(4) Keanggotaan Forum Pengurangan Risiko Bencana terdiri atas wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.

(5) Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa dan Kecamatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Badan

(6) Ketentuan mengenai pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :

a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan Penanggulangannya secara dini; dan

b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Badan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 97

(1) Setiap orang berhak :
a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan Bencana;
b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
c. setiap orang yang terkena Bencana, berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
d. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penanggulangan Bencana;
e. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial;
f. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
g. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana.

(2) Setiap orang berkewajiban :
a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana;
c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penanggulangan Bencana; dan
d. mendapatkan izin dalam pengumpulan uang dan barang untuk pengelolaan Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 98

(1) Lembaga kemasyarakatan berhak :
a. mendapatkan kesempatan dalam kegiatan Penanggulangan Bencana;
b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana; dan
c. melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan barang untuk membantu kegiatan Penanggulangan Bencana.

(2) Lembaga kemasyarakatan berkewajiban :
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau Badan; dan
b. melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai pengumpulan uang dan barang untuk membantu kegiatan Penanggulangan Bencana.

(3) Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan dalam Penanggulangan Bencana.

Bagian Keempat

Peran Lembaga Usaha

Pasal 99

(1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

(2) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

(3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam Penanggulangan Bencana.

(4) Lembaga usaha berkewajibanmenyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Badan serta menginformasikan kepada publik secara transparan.

Bagian Keempat

Peran Lembaga Internasional

Pasal 100

(1) Lembaga internasional dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap para pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah Bencana.

(3) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam Penanggulangan Bencana dengan kebijakan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai personalia, aset dan peralatan Penanggulangan Bencana yang dibawa.

(5) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi adatdan budaya Daerah.

(6) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

(7) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penanggulangan Bencana.

(8) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana oleh lembaga internasional diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 101

(1) Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

(2) Pilihan penyelesaian sengketa dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. (cat: asal usul timbunya pasal sengketa).

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 102

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.

(3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 103

(1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

BAB X

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 104

(1) Pemantauan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

(2) Pemantauan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Badan serta dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang mengelola urusan Lingkungan Hidup Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

(3) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilakukan oleh Badan.

(4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat reguler bulanan/triwulanan/semesteran.

(5) Pelaporan bulanan/triwulanan/semesteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.

(6) Pelaporan penggunaan dan bantuan keuangan atau bantuan sosial Penanggulangan Bencana, dilakukan oleh Badan/Kecamatan/Kepala Desa atau masyarakat/lembaga masyarakat selaku penerima bantuan.

(7) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilakukan pada saat kegiatan Tanggap Darurat Bencana/Penanggulangan Bencana telah merealisasikan keuangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan/bantuan sosial, atau setelah 100% (seratus persen) direalisasikan.

(8) Pelaporan realisasi keuangan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilakukan oleh Badan dan disesuaikan dengan ketentuan.

(9) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 105

Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja Penanggulangan Bencana.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 106

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan Penanggulangan Bencana di Daerah.

(2) Badan bersama instansi pengawas fungsional melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban Bencana di Daerah.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.

(4) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 107

(1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera dan pascabencana.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan Penanggulangan Bencana dari masyarakat dan dunia usaha pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Badan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Maret 2019
PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT (6/62/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA